

RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2013 - 2018



KATA PENGANTAR

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tahun 2014 - 2018 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang telah disepakati oleh segenap unsur internal dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014 - 2018. Renstra merupakan dokumen perencanaan SKPD sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung yang dimulai tahun 2014 sampai tahun 2018.

Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan SKPD, untuk itu pimpinan dan staf Dinas Sosial mempunyai tekad akan melaksanakan pokok pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2014-2018 dalam rangka pencapaian **VISI Daerah yaitu “TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”**

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang. Agar dokumen ini mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung maka seluruh jajaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung akan senantiasa komitmen terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Semoga Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2014 - 2018 ini dapat bermanfaat dan berguna untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 10 Maret 2014

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

Drs. TEGUH SURYANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19600529 198503 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan tujuan	3
1.4 Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya	4
1.5 Sistematika penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	9
2.2 Sumber daya Dinas Sosial	25
2.3 Kinerja pelayanan Dinas Sosial	28
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial ...	33
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	34
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial.....	34
3.2 Telaah Visi, Misi dan program Bupati Temanggung	35
3.3 Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.....	39
3.4 Penentuan Isu-isu strategis.....	41
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	42
4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial	42
4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial	43
4.3 Strategi dan Kebijakan	51
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	53
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL	65
BAB VII PENUTUP	70
LAMPIRAN- LAMPIRAN :	
Lampiran I Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial (2013 – 2018)	
Lampiran II BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM Dinas Sosial PENYUSUNAN RENSTRA Dinas Sosial.....	

Lampiran III BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM Dinas Sosial.....

Lampiran IV BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM Dinas Sosial.....

Lampiran V BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM KOMUNIKASI Dinas
Sosial

DAFTAR TABEL

Tabel I 2.2.2.1 Kendaraan Dinas yang dimiliki Dinas Sosial	
Tabel II 2.2.2.2 Perlengkapan / peralatan kantor yang dimiliki Dinas Sosial	
Tabel III 2.2.2.3 Tabel Bangunan	
Tabel IV 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	
Tabel V 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial	
Tabel VI 3.1 Identifikasi Permasalahan Dinas Sosial.....	
Tabel VII 3.2 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	
Tabel VII 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Berdasarkan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jateng Beserta Faktor penghambat dan Pendorong.....	
Tabel VII 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018.....	
Tabel VIII 4.3. Strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018	
Tabel IX 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial	
Tabel X 6.1 INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL	

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KAB. TEMANGGUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sosial merupakan sebuah masalah yang cara menyelesaikannya tidak cukup dengan penanganan sekali ataupun setahun – dua tahun. Penyelesaian masalah ini memerlukan penanganan yang berkali-kali dan dampak perubahannya akan dirasakan beberapa tahun setelahnya, berbeda dengan pembangunan fisik yang dampaknya bisa langsung dirasakan. Ini menjadi tantangan nyata dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial dewasa ini diwarnai adanya perubahan paradigma pembangunan yang bergeser ke arah desentralistik dalam suasana otonomi daerah yang memberikan peran lebih besar kepada daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaku utama pembangunan serta memberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun disatu sisi, pelaksanaan otonomi tidak sepenuhnya berjalan mulus dengan ditemuinya dampak negatif yang berakibat pada peningkatan kualitas persoalan dalam layanan kesejahteraan sosial, meningkatnya kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan dengan berbagai problematikanya, meningkatnya pengangguran seiring dengan semakin menyempitnya peluang kerja serta akses lainnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial adalah semakin berkurangnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yang diimplementasikan melalui 2 (dua) model pendekatan yakni pendekatan berbasis kelembagaan (Balai dan Unit Rehabilitasi Sosial) dan yang berbasis masyarakat, melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yakni Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat, baik perseorangan, keluarga, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, simultan, terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi 7 (tujuh) fokus permasalahan sosial yakni Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja Migran, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Semangat *Tat Twam Asi* (Aku adalah Engkau dan Engkau Adalah Aku) telah menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial PMKS yang berorientasi pada proses memanusiakan manusia sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara mandiri bagi kesejahteraan hidupnya. Dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran program yang mendukung **Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Memiliki Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih** sebagaimana dimaksud dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2014-2018.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang undang NO.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 disusun dengan maksud memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2014-2018) yang terangkum dalam rumusan Visi, Misi, Target, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 disusun dengan tujuan :

- a. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam rangka Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan lingkungan, masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera dengan Pemerintahan Yang Bersih melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif;

- b. Mengoperasionalkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah tahun 2013-2018 kedalam arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagaimana TUPOKSI Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;
- c. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;
- d. Sebagai tolok ukur dan penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

D. Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 di susun dengan memperhatikan dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018.

Disamping itu penyusunan Renstra Dinas Sosial juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2013, terutama dari sisi pola dan Struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Temanggung.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 terdiri dari 7 (tujuh) bab. Secara garis besar sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya.

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Bagian ini memaparkan Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Dinas Sosial, Sumber daya, Kinerja pelayanan, Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan di Dinas Sosial.

Bab III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian ini memaparkan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati Temanggung,

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah, Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bagian ini menjelaskan Visi dan Misi Dinas Sosial tahun 2014 - 2018 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Dinas Sosial, strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan dari setiap strategi terpilih.

Bab V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bagian ini memaparkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja program pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya.

Bab VI. INDIKATOR KINERJA

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Sosial pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah terpilih, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai

Bab VII. PENUTUP

Bagian ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
3. Penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang sosial;
4. Pembinaan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang sosial;
5. Pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
6. Penyediaan sarana dan prasarana sosial, pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial, dan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial;
7. Fasilitasi penganugerahan tanda kehormatan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
8. Pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia, masyarakat tidak mampu;
9. Pelaksanaan pemberian dukungan upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah sosial;
10. Penanggulangan korban bencana dan pengumpulan sumbangan sosial;
11. Pengendalian pelaksanaan undian;
12. Pengasuhan dan pengangkatan anak;
13. Fasilitasi pengelolaan perizinan di bidang sosial
14. Penyelenggaraan kesekretariat Dinas Sosial;
15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang sosial; dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang-bidang di Dinas Sosial:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi koordinasi perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data;
- b. Pengoordinasian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang;
- d. Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan bidang kesekretariatan;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi:

a. Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, penyusunan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja Dinas, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana, kepegawaian Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial

Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan potensi kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
- b. Penyusunan rencana program bidang pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengembangan potensi dan kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan bimbingan pengembangan, dan pengendalian terhadap Lembaga Pelayanan Sosial dan Tenaga Sosial;
- e. Pelaksanaan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial;
- f. Penyediaan sarana prasarana di bidang pengembangan potensi kesejahteraan sosial;

- g. Pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
- h. Pengembangan jaringan system informasi Kesejahteraan sosial;
- i. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi sumbangan sosial dan perijinan undian sosial;
- j. Penyelenggaraan peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial membawahi :

a. Seksi Pembinaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Seksi Pembinaan Potensi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan kebijakan teknis potensi kesejahteraan sosial;
- 2) melaksanakan identifikasi dan perencanaan program di bidang potensi kesejahteraan sosial;
- 3) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi di bidang potensi kesejahteraan sosial;
- 4) melaksanakan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial;
- 5) menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial;
- 6) memberikan rekomendasi izin undian;
- 7) mengendalikan pelaksanaan undian;
- 8) mengendalikan dan memberikan izin pengumpulan uang atau barang;
- 9) menyelenggarakan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial;
- 10) pelaksanaan bimbingan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, perawatan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan;
- 11) Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang di terapkan pemerintah;
- 12) Melaksanakan pemberdayaan Karang Taruna; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial.

b. Seksi Pengembangan Lembaga Pelayanan Sosial dan Profesi Pekerja Sosial.

Seksi Pengembangan Lembaga Pelayanan Sosial dan Profesi Pekerja Sosial mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan kebijakan teknis pengembangan lembaga pelayanan sosial dan profesi pekerja sosial;
- 2) Melaksanakan identifikasi, pengembangan, dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), lembaga pelayanan sosial dan profesi pekerja sosial;

- 3) Menyiapkan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial;
- 4) Memberikan penghargaan di bidang sosial;
- 5) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi antar lembaga pelayanan sosial dan profesi pekerja sosial;
- 6) Melaksanakan bimbingan, pengembangan, dan pengendalian terhadap Lembaga Pelayanan Sosial dan pekerja sosial;
- 7) Melaksanakan pemberdayaan pekerja social masyarakat dan LSM/relawan sosial.
- 8) Melaksanakan identifikasi penanganan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan lembaga pelayanan sosial dan profesi pekerja sosial;
- 9) Menyediakan sarana prasarana pendukung pengembangan lembaga pelayanan sosial dan profesi pekerja sosial;
- 10) Melaksanakan pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas dan melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang rehabilitasi sosial. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- b. Penyusunan rencana program dibidang rehabilitasi sosial;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang rehabilitasi penyandang cacat, tuna susila, anak nakal, anak jalanan, dan korban narkoba;
- d. Pelaksanaan fasilitasi bidang rehabilitasi penyandang cacat, tuna susila, anak nakal, anak jalanan dan korban narkoba;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial;
- f. Pelaksanaan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial atau terlantar;
- g. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :

- a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial;

Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial mempunyai tugas :

- 1) Menyediakan bahan rencana dan program kerja bidang Rehabilitasi penyandang cacat dan tuna sosial, termasuk eks narapidana
- 2) Melaksanakan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar;
- 3) Melaksanakan pelayanan dan Rehabilitasi penyandang cacat dan tuna sosial, termasuk eks narapidana;

- 4) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam Rehabilitasi penyandang cacat dan tuna sosial, termasuk eks narapidana;
 - 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan rujukan/penyaluran dalam usaha rehabilitasi penyandang cacat;
 - 6) Melaksanakan penanggulangan dan pemberantasan para tuna sosial ;
 - 7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi penyandang cacat dan tuna sosial.
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
- b. Seksi Rehabilitasi Anak Jalanan, Anak Nakal, dan Korban Narkotika.

Seksi Rehabilitasi Anak Jalanan, Anak Nakal dan Korban Narkotika mempunyai tugas :

- 1) Menyediakan bahan rencana dan program kerja bidang Anak Jalanan, Anak Nakal dan Korban Narkotika;
- 2) Melaksanakan penanggulangan dan pelayanan dalam upaya rehabilitasi sosial Anak Jalanan, Anak Nakal dan Korban Narkotika;
- 3) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam upaya penanggulangan dan rehabilitasi Anak Jalanan, Anak Nakal dan Korban Narkotika;
- 4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan rujukan/penyaluran dalam usaha rehabilitasi Anak Jalanan, Anak Nakal dan Korban Narkotika;
- 5) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi Anak Jalanan, Anak Nakal dan Korban Narkotika;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

4. Bidang Asistensi Sosial

Bidang Asistensi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang asistensi sosial. Untuk menyelenggarakan, Bidang Asistensi Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang asistensi sosial;
- b. Penyusunan kebijakan kerjasama di bidang asistensi sosial;
- c. Penyusunan rencana program di bidang asistensi sosial;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang asistensi sosial;
- e. Pelaksanaan fasilitasi bidang asistensi sosial;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang asistensi sosial;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Asistensi Sosial membawahi :

- a. Seksi Asistensi Korban Bencana dan Kesejahteraan Sosial;

Seksi Asistensi Korban Bencana dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- 1) Menyediakan bahan rencana dan program kerja bidang asistensi korban bencana alam dan kesejahteraan sosial;
- 2) Melaksanakan usaha penanggulangan korban bencana alam;
- 3) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan fasilitasi bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya;
- 4) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bantuan bagi keluarga perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan dan penderita penyakit menular;

- 5) Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi bantuan orang terlantar, kehabisan bekal dalam perjalanan;
 - 6) Melaksanakan jaminan sosial sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 - 7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang asistensi korban bencana alam dan kesejahteraan sosial;
 - 8) Menyediakan stok pangan untuk kesiagaan dalam upaya tanggap darurat bencana;
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Asistensi Sosial;
- b. Seksi Penyantunan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia.

Seksi penyantunan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan rencana dan program kerja bidang penyantunan anak, keluarga dan lanjut usia;
- 2) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan fasilitasi penyantunan anak, keluarga dan lanjut usia;
- 3) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bantuan penyantunan anak, keluarga dan lanjut usia;
- 4) Melaksanakan usaha-usaha penempatan anak dalam asuhan keluarga;
- 5) Melaksanakan usaha-usaha penempatan anak di Panti Asuhan, panti sosial bagi anak yatim, piatu, yatim piatu terlantar dan anak terlantar;
- 6) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bantuan keluarga miskin, fakir miskin dan keluarga rentan, bantuan lanjut usia di luar panti;
- 7) Melaksanakan usaha-usaha penempatan lanjut usia terlantar dengan rujukan di Panti Wredha /Panti Jompo;
- 8) Memberikan rekomendasi pengangkatan anak; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Asisten Sosial.

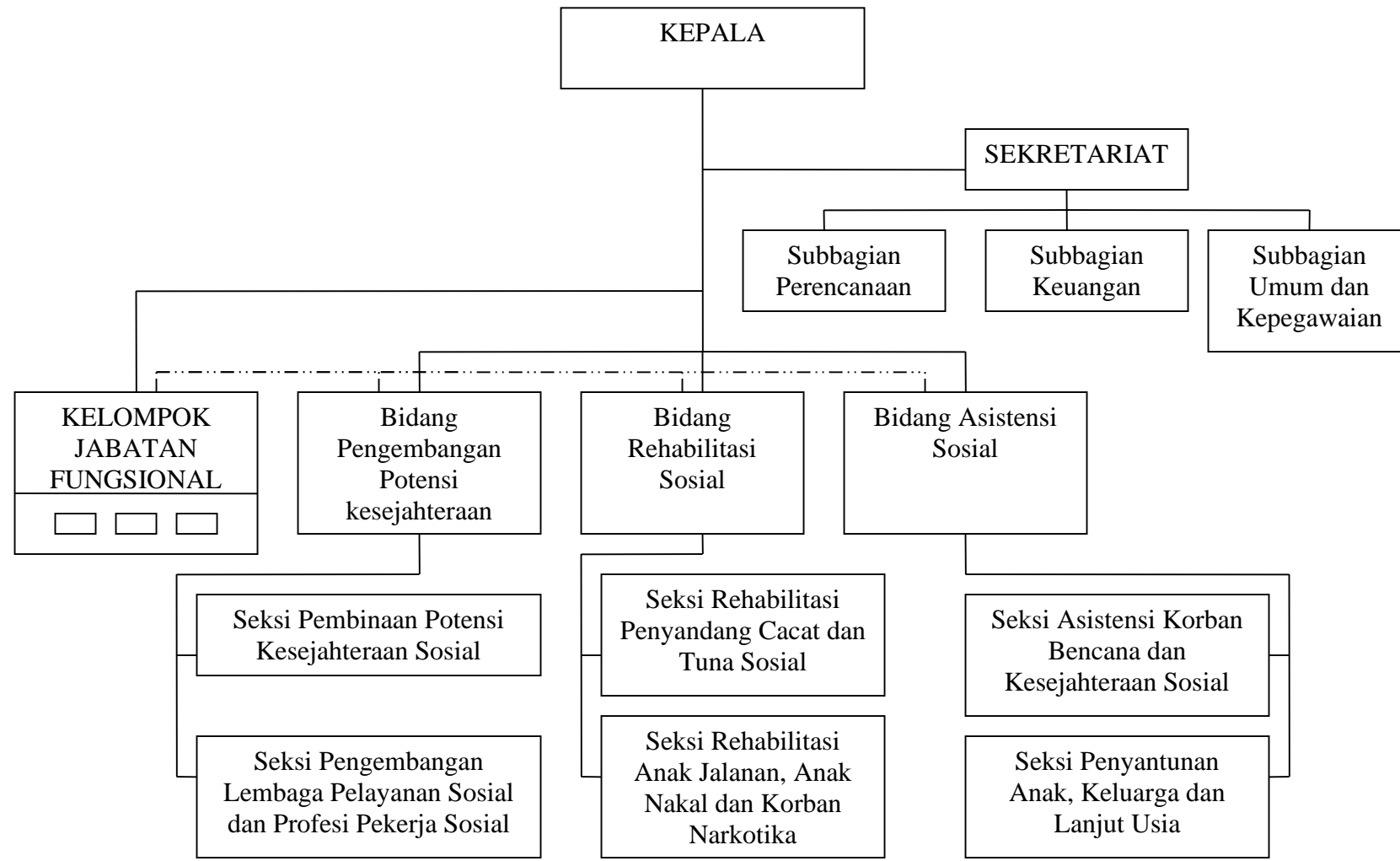
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, dengan penjelasan:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelas dari susunan organisasi dapat dilihat struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Struktur Organisasi
 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
 Tahun 2014



B. Sumber Daya Dinas Sosial

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial maka dibutuhkan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja yang memadai. Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Dinas Sosial dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.2
Kondisi Sumber Daya Manusia
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2014

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	%
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a SD	1	3,23
	b SMP	1	3,23
	c SMA	4	12,90
	d Sarjana Muda (D-III)	2	6,41
	e S-1 dan D-IV	19	61,29
	f S-2	4	12,90
	Jumlah	31	100
2	Pangkat/Golongan Ruang		
	a Gol I	2	6,25
	b Gol II	4	12,5
	c Gol III	21	68,75
	d Gol IV	4	12,5
	Jumlah	31	100
3	Jabatan		
	a Eselon II	1	3,125
	b Eselon III	3	9,375
	c Eselon IV	8	25
	d Eselon V	0	0
	e Jabatan Fungsional	0	0
	f Jabatan Fungsional Umum	19	62,5
	Jumlah	31	100
	JUMLAH	31	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2014 per 1 Maret 2014

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Dinas Sosial belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, walaupun jika dilihat dari sisi kualitas dimana diketahui bahwa 80,65 % pegawai di Dinas Sosial telah berpendidikan minimal Diploma III. Dinas Sosial merupakan dinas teknis sehingga idealnya harus memiliki SDM yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial khususnya bagi pelaksana teknis dengan jumlah SDM yang lebih banyak lagi.

Kondisi pada saat ini SDM Dinas Sosial dirasa masih kurang sehingga dapat mengurangi kualitas pelayanan maupun kuantitas sasaran pelayanan. Sehingga perlu penambahan SDM dan perlu peningkatan kapasitas baik melalui Diklat atau Pelatihan untuk dapat meng *up-grade* ketrampilan dan pengetahuan sesuai dengan perkembangan metode dan teknik yang berkembang dalam pelayanan sosial. Disamping itu perlu pula dilakukan Pengangkatan Jabatan Fungsional seperti Pekerja Sosial maupun Penyuluh Sosial untuk mendukung optimalisasi Pelayanan Sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung. Perlunya melibatkan peran aktif Relawan, Lembaga atau Organisasi Sosial yang menjadi Mitra Kerja Dinas Sosial seperti TKSK, Karang Taruna, Tagana, Pendamping PKH, K3S, LK3, Komda Lansia, dan lain-lainnya termasuk Dunia Usaha yang memiliki tujuan, visi dan misi yang selaras dengan Dinas Sosial.

Adapun dukungan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.3.
Kondisi Sarana dan Prasarana
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2014

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	4	Bidang	Baik
b.	Gedung	23	Gedung	Baik
c.	Alat-alat angkutan	10	Buah	Baik
d.	Alat-alat perkantoran	83	Buah	Baik
e.	Monumen	9	Buah	Baik
f.	Alat Studio/ Komunikasi	11	Buah	Baik
g.	Jaringan	2	Buah	Baik

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2014

C. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

1. Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2009 – 2013

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung berdasarkan rencana strategi tahun 2009 – 2013 dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2009 – 2013 dengan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2009 – 2013

NO	INDIKATOR SASARAN	Target Renstra tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya (orang)	2%	2%	2%	60	60	0,98%	0,49%	20%	70	60	49%	25%	1000%	117%	100%
2	Pemberdayaan wanita rawan sosial (orang)	2%	2%	2%	60	60	0,98%	0,49%	20%	40	60	49%	25%	1000%	67%	100%
3	Pemberdayaan tuna sosial (orang)	2%	2%	2%	45	50	0,04%	0,04%	20%	20	48	2%	2%	1000%	44%	96%
4	Jumlah pengembangan karang taruna dari status tumbuh menjadi berkembang (desa)	10	10	10	13	14	10	10	5	3	24	100%	100%	50%	23%	171%
5	Jumlah pengembangan PSM terlatih (orang)	25	25	25	50	75	10	10	5	3	120	40%	40%	20%	6%	160%
6	Pemberdayaan lanjut Usia (orang)	60	60	60	50	50	25	50	22	100	50	42%	83%	37%	200%	100%
7	Jumlah sasaran pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan anak nakal, anak terlantar dan anak jalanan (orang)	38	38	38	80	80	50	50	80	114	91	132%	132%	211%	143%	114%

8	Terlaksananya pembinaan para penyandang cacat dan trauma (orang)	2%	2%	2%	60	60	0,74%	0,74%	10%	138	82	37%	37%	500%	230%	137%
9	Terbinanya panti asuhan / panti jompo (panti)	100%	100%	100%	6	6	100%	100%	100%	6	6	100%	100%	100%	100%	100%
10	Terbinanya eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)(orang)	5%	5%	5%	30	30	-	-	20%	10	45	0%	0%	400%	33%	150%
11	Pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial (unit)	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	0%	100%	100%	100%	0%
12	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi sosial dan kelembagaan sosial lainnya (unit)	3	3	3	6	6	9	4	4	4	6	300%	133%	133%	67%	100%
13	Tersedianya sarana rehabilitasi sosial berbasis keluarga / masyarakat (unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100%	100%	100%	200%	200%
14	Terbinanya dan fasilitasi FK-PSM (unit)	5	5	5	10	10	-	-	1	10	10	0%	0%	20%	100%	100%
15	Terbinanya dan fasilitasi Komda Lansia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Terbina dan fasilitasi tempat penitipan anak dan kelompok bermain (unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%
17	Terbina dan fasilitasi FK-KT (unit)	5	5	5	10	10	-	-	-	1	20	0%	0%	0%	10%	200%
18	Terbina dan fasilitasi K3S Kabupaten (keg)	100%	100%	100%	2	2	-	100%	-	2	3	0%	100%	0%	100%	150%
19	Meningkatnya kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan NAPZA (orang)	20%	20%	20%	15	15	17.44%	-	-	20	45	0%	0%	0%	133%	300%

20	Meningkatnya rehabilitasi, pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan anak nakal, anak terlantar dan anak jalanan (anak)	40	40	40	40	40	40	40	6	40	20	100 %	100 %	15%	100 %	50%
21	Pengembangan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial (orang)	100%	100%	100%	110	110	100%	100%	100%	110	55	100 %	100 %	100%	100 %	50%
22	Meningkatnya kesejahteraan sosial janda pahlawan dan keluarga veteran (orang)	100%	100%	100%	27	27	100%	100%	100%	48	25	100 %	100 %	100%	178 %	93%
23	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan (lokasi)	100%	100%	100%	2	2	100%	100%	100%	2	2	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
24	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
25	Pembentukan TAGANA (desa)	5	5	5	5	5	-	-	-	-	25	0%	0%	0%	0%	500 %
26	Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni (rumah)	200	300	300	300	300	301	396	300	463	559	151 %	132 %	100%	154 %	186 %
27	Meningkatnya rasio rumah layak huni	2%	2%	2%	4%	4%	3,09%	4,06 %	3,08 %	4,75 %	5,13 %	154 %	203 %	154%	119 %	128 %
28	Tertanganinya daerah rawan sosial pedesaan daerah tepi hutan atau wilauah perbatasan (desa)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	0%	0%	0%	0%	100 %

Dari tabel diatas terlihat keberhasilan hampir semua indikator tercapai pada tahun ke- 5 (lima) secara akumulasi, walaupun pada tahun-tahun sebelumnya belum tercapai. Pada tahun 2011 dilakukan review terhadap target RPJMD sehingga ada beberapa satuan indikator yang disesuaikan untuk memudahkan perhitungan dan beberapa target indikator yang disesuaikan dengan kemampuan Dinas dan Daerah.

2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Tahun 2009 – 2013

Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Sosial melalui pelaksanaan renstra tahun 2009 - 2013 untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2009 - 2013

INDIKATOR SASARAN	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi

Dari tabel diatas terlihat rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2009 – 2013 terlihat cukup stabil hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran di Dinas Sosial.

D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

1. Tantangan

Tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

- a. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan teknologi informasi dan pembangunan.
- b. Belum adanya kesepahaman antara Dinas Sosial dengan Dinas Kesehatan tentang penanganan gelandangan terlantar ditambah tingginya intensitas perpindahan PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan dan penanganan PMKS Jalanan.
- c. Belum optimalnya kualitas dan jumlah Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial (PNS dan non PNS), Sarana Prasarana terutama mobil operasional untuk penanganan PGOT dan sepeda motor.
- d. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- e. Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- f. Belum terbentuknya Forum *CSR (Corporate Social Responsibility)* untuk membantu penanganan PMKS dan pengembangan PSKS dikarenakan belum adanya Perda atau Perbup tentang CSR.
- g. Pemkab belum memiliki Panti atau Balai Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten sendiri, sementara beberapa kendala seperti kasus-kasus anak terlantar (bayi dibuang), orang terlantar yang tidak dapat diidentifikasi karena pikun, eks psikotik atau retardasi mental yang harus di rujuk ke balai yang ada di daerah lain. Tetapi terkadang panti atau balai yang ada sudah overload dan tidak mampu menerima rujukan.

- h. Kesulitan menentukan jumlah sasaran anak penghuni panti yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan tidak ada pemisahan antara Pondok Pesantren dengan panti asuhan.

2. Peluang

Peluang dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan Dunia Usaha.
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab Instusi Sosial secara berjangjang dari Pusat hingga Kabupaten/Kota.
- c. Pemahaman tentang permasalahan sosial mulai dipahami oleh berbagai pihak yang terkait.
- d. Rumah Perlindungan Sosial yang diharapkan mampu menampung sementara PMKS korban tindak kekerasan dan ketelantaran sebelum memperoleh penanganan lebih lanjut di Balai Rehabilitasi Sosial.
- e. Optimalisasi anggaran belanja daerah melalui penyusunan *Roadmap* indikasi program, kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial.
- f. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai instrumen untuk mendorong pengembangan dan optimalisasi pelayanan rehabilitasi sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial dan Panti Sosial milik masyarakat.
- g. Kerjasama *stakeholders* baik perguruan tinggi, Dunia Usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam kerangka melakukan terobosan dan inovasi dalam penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Permasalahan dan tantangan merupakan titik awal dalam merumuskan arah kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Korelasi antara masalah dan peta kebutuhan menjadi simpul keterkaitan sebagai landasan penyusunan arah kebijakan dan langkah operasional pelayanan kesejahteraan sosial. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpul hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah antara lain:

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Dinas Sosial antara lain :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

Aspek kajian	Capaian / kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Data Anak Panti Asuhan	Ada data anak panti asuhan yang belum sesuai dengan ketentuan	Adanya data anak panti yang update	-	Adanya keengganan dari LSKA untuk memisahkan data anak di pondok pesantren dengan di panti asuhan	Kesulitan meminta data anak panti asuhan di 2 LKSA yang terdiri dari pondok pesantren dan panti asuhan
Kemitraan Strategis	Belum mempunyai Forum CSR	Adanya Forum CSR tingkat Kabupaten	-	Belum mempunyai Perda/Perbup tentang CSR	Penangan PMKS dan Pengembangan PSKS belum terkoordinasikan secara baik dengan Dunia Usaha
Sumber Daya Manusia	Belum memiliki jabatan fungsional khusus	Adanya Jabatan Fungsional khusus (pekerja sosial, penyuluh sosial, perencana, dll)	Belum memiliki <i>roadmap</i> yang jelas tentang jabatan fungsional khusus	Belum ada jenis pekerja sosial diluar panti	Ada beberapa pelayanan yang kurang maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman petugas

Sarana dan Prasarana	Sudah memiliki rumah perlindungan sosial tetapi belum mempunyai kendaraan operasional	Adanya kendaraan operasional untuk penanganan PGOT dan sepeda motor	-	Usulan kendaraan operasional belum disetujui	Setelah rumah perlindungan sosial beroperasi, akan kesulitan dalam menjemput atau mengirim klien (terutama gelandangan terlantar) untuk penanganan lanjutan
----------------------	---	---	---	--	---

B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun kedepan adalah **“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”** dengan penjelasan:

1. **Daerah agraris berwawasan lingkungan** merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
2. **Masyarakat Agamis** merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.
3. **Berbudaya** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial

kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

4. **Sejahtera** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.
5. **Pemerintahan yang bersih** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung di atas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam 6 (enam) Misi Daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan;
2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2014 - 2018 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama. Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sector, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu “**BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG**”. Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Telaahan sebagaimana dimaksud tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial
Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Memiliki Masyarakat Agamis, Berbudaya, Dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih				
NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera			
A	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Terbatasnya SDM di SKPD secara kuantitas dan kualitas	Kurangnya anggaran	UU, PP, Permen
B	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terbatasnya SDM	Belum memiliki kendaraan operasional PGOT	Sudah memiliki Rumah Perlindungan Sosial
C	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Terbatasnya SDM di SKPD secara kuantitas dan kualitas	Pihak keluarga penyandang cacat dan trauma cenderung tertutup	Adanya Kerjasama dengan lembaga swasta (UCP RUK)
D	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Terbatasnya SDM di SKPD secara kuantitas dan kualitas	Belum menemukan teknik pembinaan yang efektif	Adanya Kerjasama dengan lembaga swasta
E	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terbatasnya SDM di SKPD secara kuantitas dan kualitas	Belum simultannya penguatan PSKS dengan penanganan PMKS dan Belum ada Forum CSR tingkat Kab.	Kerjasama yang bagus dengan PSKS

F	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	-	-	Adanya BPBD
G	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	-	-	Adanya BPBD
H	Program Pengelolaan TMP	Belum ada petugas khusus pengelola TMP	Kurangnya anggaran	

C. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam dokumen Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang memuat dalam upaya menggeser paradigma urusan sosial yang semula sekedar urusan residual menjadi urusan wajib yang didukung oleh akurasi data dan indikator kinerja terukur; diimplementasikan kedalam 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial; dilaksanakan secara sinergis melalui kemitraan pemerintah-masyarakat-dunia usaha (pilar good governance); serta berorientasi kepada pemulihan sosial psikologis PMKS dan penguatan kapasitas PSKS.

Permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung berdasarkan sasaran rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 beserta faktor penghambat dan pendorong yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut pada tabel berikut :

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Berdasarkan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jateng
Beserta Faktor penghambat dan Pendorong

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
A	Penanganan PMKS	Terbatasnya SDM	Anggaran yang terbatas	Adanya rapat koordinasi
B	Pemberdayaan PSKS	Terbatasnya SDM	Anggaran yang terbatas	Adanya rapat koordinasi
C	Peningkatan Kualitas Layanan Balai Rehabilitasi Sosial	Terbatasnya SDM	Beberapa Barehsos sudah penuh	Mempunyai Rumah Perlindungan Sosial

D. Penentuan Isu – isu Strategis

Berbagai isu muncul sebagai dampak dari proses pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan selama ini antara lain:

1. Integrasi data penanganan kemiskinan lintas SKPD.
2. Perlindungan sosial anak dan lanjut usia yang berperspektif penyediaan tumbuh kembang anak dan penyediaan keberlanjutan kehidupan lanjut usia dalam program *daycare services*.
3. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas melalui penyediaan aksesibilitas penyandang disabilitas, eks penyandang penyakit sosial serta penyusunan payung hukum pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
4. Perlindungan dan jaminan sosial terhadap pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam serta pekerja sektor informal.
5. Penguatan kapasitas stakeholders dalam kerangka pengumpulan dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan menguatnya keberpihakan dunia usaha dalam penanganan PMKS.
6. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta perintis kemerdekaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
7. Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mendukung penanganan PMKS.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung, maka Dinas Sosial Kabupaten Temanggung akan berupaya melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dengan visi: **“Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Melalui Optimalisasi Pemberdayaan PSKS dan Profesionalisme Pelayanan Sosial”**. Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat dengan kategori PMKS menjadi meningkat berfungsi sosialnya dengan cara pemberdayaan dan penguatan PSKS ditunjang dengan peningkatan pelayanan sosial dengan berpedoman kepada 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial.

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam yang dijabarkan kedalam 3 (tiga) misi yakni:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi, Perlindungan, Pemberdayaan, dan Jaminan Sosial demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas PSKS;
3. Meningkatkan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dengan visi dan misi dinas tersebut diharapkan mampu memberikan semangat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di tahun 2013-2018 khususnya dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga seluruh komponen SDM Dinas Sosial harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat dan dinamika yang sama.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Mengengah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
 Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun ke				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Penanganan Permasalahan Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	18%	18%	18%	18%	18%
			Persentase anak terlantar yang tertangani	0,93%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%
			Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	2,88%	3,08%	3,18%	3,18%	3,18%
			Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	2,71%	2,71%	4,6%	4,78%	5,06%
			Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis	0,34%	1%	1,5%	2,25%	3%
			Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	8,34	12,34	16,34	20,34	24,34
			Cakupan Lembaga Kesejahteraan	100%	100%	100%	100%	100%

			sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial					
			Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	0%	24,22%	24,22 %	25,61 %	25,95 %
			Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	100%	100%	100%	100%

C. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial

Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung dilaksanakan melalui 9 (sembilan) pendekatan yakni:

1. **Pendampingan dan Perlindungan Sosial**, yang meliputi perlindungan sosial terhadap PMKS lanjut usia, anak dan korban tindak kekerasan.
2. **Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial**, yang meliputi pendampingan dan rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok rentan.
3. **Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS Dalam Penanganan PMKS**, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS.
4. **Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan**, meliputi serangkaian upaya memberdayakan PMKS potensial sehingga mampu menemukan potensi yang dimiliki termasuk inisiasi membangun jejaring kemitraan strategis dengan berbagai *stakeholders* yang memiliki komitmen dalam penanganan PMKS.
5. **Perlindungan dan Jaminan Sosial**, meliputi serangkaian upaya untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat (PMKS) sangat rentan/tidak potensial memperoleh perlindungan dan jaminan sosial bagi keberlanjutan kehidupannya.
6. **Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Pelaksana Kesejahteraan Sosial**, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
7. **Peningkatan Kesadaran dan Tanggungjawab Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**, meliputi berbagai upaya inovatif dan sistematis untuk memberikan berbagai alternatif pelayanan kesejahteraan sosial.
8. **Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**, meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial termasuk peningkatan layanan pada Rumah Perlindungan Sosial.
9. **Peningkatan Kualitas Perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**, meliputi berbagai rumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak pada meningkatnya kualitas hidup PMKS dan kapasitas PSKS.

Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung diarahkan kepada:

1. Perlindungan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan anak sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak.
2. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat), Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS).
3. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS eks penyandang penyakit sosial.

4. Penguatan kapasitas PSKS (motivasi, pengetahuan, ketrampilan dan penyediaan daya dukung lainnya) dalam penanganan PMKS
5. Pemberdayaan Sosial Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Daerah Tepi Hutan serta Meningkatkan semangat keperintisan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan.
6. Penyediaan logistik dan dapur umum bagi korban bencana, pengerahan TAGANA di lokasi Bencana serta Penyiapan TAGANA yang tangguh.
7. Fasilitasi Koordinasi dan monitoring pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
8. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial terarah, terpadu, berkelanjutan dan profesional.
9. Membangun kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
11. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan penganggaran.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pencapaian target kinerja Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun dan pencapaian target penerapan SPM. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2014 – 2018 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung (Bantuan Sosial /Hibah) :

1. Bantuan Stimulan UEP bagi keluarga Fakir Miskin (FM)
2. Bantuan Stimulan UEP bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
3. Bantuan Sosial UEP untuk Lanjut Usia Potensial
4. Bantuan Sosial untuk Panti
5. Bantuan tambahan permakanan bagi anak panti
6. Bantuan Sosial rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
7. Bantuan Sosial bagi keluarga miskin rawan sosial perdesaan tepi hutan
8. Bantuan sosial Pemulangan orang terlantar dalam perjalanan
9. Jaminan Sosial LUT Non Potensial
10. Jaminan Sosial Penyandang Penyakit Kronis, Cacat Berat dan Ganda
11. Bantuan Sosial Pemberdayaan KT
12. Bantuan Sosial bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
13. Bantuan Sosial Bagi Forum Karang Taruna (FK-KT)
14. Bantuan Sosial Bagi Forum PSM (FK-PSM)
15. Bantuan Sarana dan Prasarana Forum TKSK
16. Bantuan Sarana dan Prasarana Forum Tagana
17. Bantuan Sosial bagi Pengembangan WKSBM

B. Belanja Langsung :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Belanja cetak dan penggandaan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- i. Penyediaan makanan dan minuman
 - j. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - k. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - l. Jasa Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
 - a. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 3. Program Peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD
 5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya :
 - a. Fasilitasi Program Keluarga Harapan
 - b. Peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi keluarga miskin
 - c. Peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
 - d. Bimbingan Lanjut KUBE
 - e. Pelayanan Sosial LUT Potensial. Fasilitasi Program Keluarga Harapan
 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - a. Bimbingan dan pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan bagi korban penyalahgunaan Narkotika, HIV/AIDS
 - b. Fasilitasi UPSK (Unit Pelayanan Sosial Keliling) dan Bantuan Sosial
 - c. Pengiriman PGOT Psikotik ke RSJ, Barehsos, Keluarga
 - d. Pendidikan dan pelatihan Paca dan eks trauma ke/dari BBRSD Prof. Dr Soeharso Surakarta dan Balatran Semarang
 - e. Pelatihan keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi di Barehsos Wanodyatama II Kendal
 - f. Fasilitasi Jaminan Sosial bagi Penderita Penyakit Kronis dan Cacat Berat
 - g. Pelayanan dan perlindungan sosial/hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak
 - h. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- j. Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- 7. Program pembinaan anak terlantar
 - a. Pelayanan dan Pembinaan keterampilan anak nakal, anak jalanan, anak terlantar luar panti
 - b. Porseni anak panti di tingkat kabupaten
 - c. Pelatihan keterampilan kerja Bantuan Sosial bagi anak penghuni panti asuhan
 - d. Pengiriman dan penjemputan kembali di PSPA "SATRIA" Baturadem
 - e. Bimbingan dan pelatihan ketrampilan anak jalanan, anak terlantar di Barehsos Taruna Yodha dan PSBR Bambu Apus Jakarta
 - f. Pengiriman dan penjemputan anak nakal ke/dari PSMP Antasena Magelang dan Bahresos Kartini Tawangmangu Solo
- 8. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
 - a. Pentas seni dan olah raga penyandang cacat tk Provinsi
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Petugas/Terapis pendamping bagi PACA Tubuh
 - c. Bantuan pengadaan kursi roda
 - d. Bantuan Sosial Ketrampilan dan Bantuan UEP bagi Eks Penderita Penyakit Kronis , Cacat Rungu Wicara, Cacat Netra.
 - e. Pelayanan sosial LUT Non Potensial
- 9. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, Narkoba dan penyakit penyakit sosial lainnya)
 - a. Bimbingan sosial keterampilan eks Napi dan PSK
 - b. Razia Tuna Sosial
- 10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial
 - a. Sosialisasi bagi pengurus panti,pendataan panti dan fasilitasi bantuan (permakanan)
 - b. Fasilitasi Bantuan Sosial dan kegiatan untuk panti
 - c. Fasilitasi rapat dan kegiatan PSKS di dalam daerah dan luar daerah (KT,PSM,TKSK,pengurus orsos)
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang SIKS/PUSDATIN
 - e. Pemutakiran data PMKS/PSKS
 - f. Fasilitasi Bantuan Sosial Bagi FK-PSM Kabupaten dan Kecamatan
 - g. Bulan Bhakti Karang Taruna
 - h. Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
 - i. Fasilitasi Kegiatan Komda Lansia dan Bantuan
 - j. Pembuatan Data Lansia
 - k. Fasilitasi Bantuan Sosial Pemberdayaan KT
 - l. Fasilitasi Bantuan Sosial dan kegiatan bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 - m. Pembentukan dan Fasilitasi Bantuan Sosial Bagi FK-PSM Kabupaten dan Kecamatan

- n. Fasilitasi Bantuan Sosial dan kegiatan Bagi FK-KT
 - o. Fasilitasi kegiatan dan bantuan bagi K3S
 - p. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
 - q. Capacity building bagi PSKS
 - r. Penyelenggaraan Hari Lansia Nasional
 - s. Operasional Rumah Perlindungan Sosial
 - t. Pembentukan dan Fasilitasi Bantuan Sosial Bagi WKSBM
11. Program Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana
Pemantapan Tagana
12. Program Pemberdayaan Fakir Miskin
Pelayanan Sosial bagi keluarga miskin rawan sosial perdesaan tepi hutan
13. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayuda mudal dan Bambang Sugeng Kranggan

Adapun kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana terlampir.

Tabel 5.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BKBPP
Kabupaten Temanggung**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2012	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
					2013 (Sesuai APBD 2013)			2014 (sesuai DPA 2014)		2015		2016		2017		2018	
					target	prediksi capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Penanganan Permasalahan Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	17,63	17,67	17,67	313.385.000	17	417.180.000	17	778.712.500	17	779.712.500	17	779.712.500	17	779.712.500
		Bantuan Sosial untuk Orang Terlantar dalam perjalanan	Orang Terlantar dalam perjalanan yang tertangani dan mendapat bantuan	47	70	70	3.500.000	80	4.000.000	80	4.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000
	BTL 5	Bantuan Sosial untuk Pemakanan Anak Panti Asuhan	Cakupan Anak Panti yang mendapat bantuan pemakanan	283	283	283	309.885.000	283	413.180.000	283	774.712.500	283	774.712.500	283	774.712.500	283	774.712.500
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang mendapat bantuan PKH	100%	100%	100%	492.430.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	600.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000
		Fasilitasi Program Keluarga Harapan	terfasilitasinya PKH	100% (9422 KK)	100%	100%	492.430.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	700.000.000	100%	750.000.000
	260	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Anak Terlantar yang ditangani	0,01	0,93 %	0,93 %	43.600.000	0,93%	84.715.000	1,28%	119.000.000	1,28%	132.000.000	1,28%	158.000.000	1,28%	174.000.000

hal 241	Pembinaan Anak Nakal, Anak Jalanan, dan anak Terlantar Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dilatih, dibina dan dibantu	20	20	20	31.600.000	20	30.000.000	20	33.000.000	20	36.000.000	20	40.000.000	20	46.000.000
hal 246	Porseni Anak Panti Tingkat Kabupaten	Terselenggaranya Porseni untuk Aktualisasi diri potensi dan bakat anak panti	1 KEG	0	0	-	1	24.715.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000
hal 246	Pelatihan Ketrampilan kerja dan bantuan sosial bagi anak penghuni panti asuhan	Jumlah Anak Panti yang dilatih dan dibantu	6	12	12	12.000.000	12	30.000.000	24	36.000.000	24	36.000.000	24	48.000.000	24	48.000.000
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	2,70%	2,76%	2,73%	206.376.500	2,88%	327.479.500	3,08%	420.000.000	3,08%	467.000.000	3,08%	517.000.000	3,08%	523.000.000
Hal 232	Pengiriman dan penerimaan kembali petirah di PSPA "SATRIA" Baturaden	Jumlah anak yang berperilaku menyimpang yang telah direhabilitasi melalui PSPA Baturaden	110	55	55	61.687.500	55	64.997.000	55	65.000.000	55	69.000.000	55	75.000.000	55	80.000.000
hal 234	Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar, anak jalanan dan anak nakal	Jumlah anak yang telah direhabilitasi melalui PA Taruna Yodha Sukoharjo dan PSBR Bambu Apus Jakarta	20	40	40	39.770.000	56	74.999.000	60	115.000.000	60	120.000.000	60	125.000.000	60	130.000.000
hal 236	Pengiriman dan penjemputan anak nakal	Jumlah anak yang telah direhabilitasi melalui PA Antasena Magelang dan Barehsos Kartini Tawangmangu	30	39	36	39.120.000	40	40.000.000	40	45.000.000	40	51.000.000	40	56.000.000	40	60.000.000

hal 240	Bimbingan dan pelatihan ketampilan dan pemberian bantuan bagi korban penyalahgunaan Narkotika, HIV Aids	Jumlah korban penyalahgunaan narkotika dan HIV AIDS yang telah dibina, dilatih dan dibantu	10	20	20	19.661.000	20	24.995.500	30	35.000.000	30	42.000.000	30	50.000.000	30	55.000.000
hal 240	Fasilitasi UPSK dan Bantuan Sosial	Terlaksananya UPSK bagi Penyandang disabilitas dan Penyakit Kronis di wilayah 2 Kecamatan	1	1	1	16.294.000	1	39.996.500	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	38.000.000
hal 243	Pengiriman PGOT Psikotik ke RSJ, Barehsos dan Keluarga	Persentase Pengiriman PGOT Psikotik yang direhabilitasi melalui RSJ, Barehsos, Keluarga	78	80	80	38.910.000,-	80	39.998.000	80	65.000.000	80	70.000.000	80	75.000.000	80	80.000.000
hal 243	Pendidikan dan Pelatihan bagi Paca dan Eks Trauma di BBRSD Prof. Dr. Suharso Surakarta dan Balatrans Semarang	Persentase Paca dan Eks Trauma yang direhabilitasi melalui Barehsos	15	15	15	19.874.000	15	29.994.000	20	35.000.000	30	45.000.000	30	56.000.000	30	60.000.000
hal 248	Pelatihan Ketrampilan bagi PRSE di Barehsos Wanodyotomo Kendal	Jumlah PRSE yang direhabilitasi di Barehsos	0	20	20	9.970.000	15	12.499.500	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	0	0	.0,94%	320.065.500	2,72%	712.640.000	3,45%	914.200.000	4,6%	1.089.200.000	0	1.034.200.000	0	1.115.200.000
BTL 13	Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat dan Ganda	Terfasilitasinya Penderita Penyakit Kronis dan Cacat Berat/ganda yang mendapat Jaminan Sosial	0	0	0	-	50	90.000.000	80	144.000.000	100	180.000.000	120	216.000.000	150	270.000.000

hal 245	Fasilitasi Jaminan Sosial bagi Penderita Penyakit Kronis dan Cacat Berat	Terfasilitasinya Penderita Penyakit Kronis dan Cacat Berat yang mendapat Jaminan Sosial	0	0	0	-	50	9.999.000	80 org	15.000.000	1	18.000.000	1	21.000.000	1	27.000.000
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma															
hal 242	Pentas Seni dan Olah Raga Penyandang Cacat Tingkat Provinsi	Jumlah peserta Kegiatan Pentas Seni dan Olah Raga bagi Penca Tk Prov yang diikuti	20	20	20	29.680.000	20	29.999.000	20 org	30.000.000	20	36.000.000	20	40.000.000	20	46.000.000
hal 244	Pendidikan dan Pelatihan bagi Petugas Teraphis pendamping bagi Paca Tubuh	Jumlah Teraphis terlatih	0	0	30	40.000.000	10	25.000.000	10 org	55.000.000	10 ORG	60.000.000	10 ORG	65.000.000	10 ORG	70.000.000
hsl 244	Bantuan Pengadaan Kursi Roda	Jumlah Penca yang mendapat bantuan Kursi roda	8	10	10	19.775.000	20	24.999.000	20 org	35.000.000	20	40.000.000	20	45.000.000	20	50.000.000
hal 245	Bimbingan sosial dan Bantuan UEP Ketrampilan bagi eks Penyakit Kronis Cacat Rungu Wicara dan Cacat Netra	Jumlah eks Penyakit Kronis Cacat Rungu Wicara dan Cacat Netra yang dilatih dan dibantu	0	60	60	92.066.000	60	61.093.000	60 org	65.000.000	60	70.000.000	60	75.000.000	60	80.000.000
BTL 9	Jaminan Sosial LUT Non Potensial	Jumlah LU Non Potensial yang mendapat Jaminan Sosial	0	50	50	120.000.000	240	432.000.000	289	520.200.000	289	520.200.000	289	520.200.000	289	520.200.000
hal 239	Pelayanan sosial LUT Non Potensial	Jumlah LU Non Potensial Terlantar yang terlayani dan mendapat jaminan sosial	0	50	50	18.544.500	240	39.550.000	289	50.000.000	1	50.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000
hal 249	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Cakupan Eks Napi, PSK, Narkoba dan PGOT yang telah dibina	21	19	19	34.970.000	24	41.997.000	24	50.000.000	20	57.500.000	20	62.500.000	20	70.000.000

248	Bimbingan Sosial Ketrampilan bagi Eks Napi	Prosentase Eks Napi yang telah dibina , dilatih dan dibantu	15	15	15	19.970.000	20	24.999.000	20	30.000.000	20	32.500.000	20	35.000.000	20	40.000.000
hal 249	Razia Tuna Sosial	Jumlah kegiatan Razia dalam 1 tahun	6	4	4	15.000.000	4	16.998.000	4	20.000.000	4 keg	25.000.000	4 keg	27.500.000	4 keg	30.000.000
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis	0,33%	0,29	0,29	266.164.000	0,35%	345.000.000	0,46%	455.000.000	0,46%	570.000.000	0,46%	620.000.000	0,46%	620.000.000
BTL 1	Bantuan Stimulan UEP bagi keluarga Fakir Miskin (FM)	Jumlah Fakir Miskin yang dilatih dan mendapat bantuan	60	60	60	60.000.000	80	80.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000
hal 231	Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan bagi keluarga Fakir Miskin (FM)	Jumlah Fakir Miskin yang dilatih dan mendapat bantuan	60 KK	60 org	60org	23.578.000	80org	25.000.000	100 org	35.000.000	100 org	35.000.000	100 org	35.000.000	100 org	35.000.000
BTL 2	Bantuan Stimulan UEP bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Jumlah PRSE yang dilatih dan mendapat bantuan Stimulan UEP	60	60	60	60.000.000	80	80.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000
233	Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan bagi PRSE	Jumlah PRSE yang dilatih dan mendapat bantuan	60	60 org	60 org	23.884.500	80org	30.000.000	100 org	35.000.000	100 org	35.000.000	100 org	35.000.000	100 org	35.000.000
hal 233	Bimbingan Lanjut KUBE	Persentase KUBE yang dibina	0	0	0	-	110 kube	15.000.000	110 kube	20.000.000	100 kube	20.000.000	100 kube	20.000.000	100 kube	20.000.000
BTL 3	Bantuan Sosial UEP untuk Lanjut Usia Potensial	Jumlah LU Potensial yang dilatih dan mendapat bantuan	50 kk	60 org	60 org	50.000.000	60	60.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000

hal 237	Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Potensial	Jumlah LU Potensial yang dilatih dan mendapat bantuan	50	60	60	19.021.500	60 org	25.000.000	100 org	30.000.000	100 org	35.000.000	100 org	35.000.000	100 org	35.000.000
BTL 7	Bantuan Sosial bagi keluarga miskin rawan sosial pedesaan tepi hutan	Jumlah KK Miskin yang dilatih dan dibantu	0	20	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000
hal 239	Pelayanan Sosial Bagi Keluarga Miskin Rawan Sosial pedesaan tepi hutan	Jumlah KK Miskin yang dilatih dan dibantu	0	20 org	20 org	9.680.000	20 kk	10.000.000	20 kk	15.000.000	20 kk	15.000.000	20 kk	15.000.000	20 kk	15.000.000
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial	100%	100%	100%	39.332.000	1	55.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	85.000.000	1	95.000.000
hal 234	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Persentase bayi/anak terlantar yang tertangani	6	6	100%	5.870.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
hal235	Penyusunan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	Jumlah Raperda tentang Penanganan terhadap PMKS	1	1	1	18.920.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000
hal 235	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Kegiatan yang telah dilakukan Monev dan pelaporan	0	100%	100%	14.542.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	4,31%	4,31%	4,31%	3.731.496.000	0	3.860.000.000	0	5.150.000.000	0	5.175.000.000	0	5.200.000.000	0	5.325.000.000
BTL 6	Bantuan Sosial rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah KK RTLH yang difasilitasi mendapat bantuan sosial	498	500	500	3.625.000.000	500	3.750.000.000	500	5.000.000.000	500	5.000.000.000	500	5.000.000.000	500	5.000.000.000

	hal 231	Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah KK RTLH yang difasilitasi mendapat bantuan sosial	498 kk	500 kk	500 kk	106.496.000	500	110.000.000	500	150.000.000	500	175.000.000	500	200.000.000	500	325.000.000	
Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	54.714.000	1	76.725.000	1	130.000.000	1	135.500.000	1	142.000.000	1	146.000.000	
	hal 247	Pembinaan dan Pendataan bagi Pengurus dan Anak Panti Asuhan	Jumlah Panti yang didata dan dibina	6	6	6	19.714.000	6	21.985.000	6	25.000.000	6	28.000.000	6	31.000.000	6	33.000.000	
	BTL 4	Bantuan Sosial Bagi Panti	Jumlah Panti Yang dibantu sarana prasarananya	6	6	6	35.000.000	6	45.000.000	6	90.000.000	6	90.000.000	6	90.000.000	6	90.000.000	
	hal 247	Fasilitasi Bantuan Sosial Bagi Panti dan anak Panti Asuhan	Jumlah Panti dan Anak Panti yang dibantu	0	0	0	0	6	9.740.000	6	15.000.000	6	17.500.000	6	21.000.000	6	23.000.000	
	250 -1	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dunia Usaha	Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS	10	10	10	9.749.910	15	15.000.000	20	35.000.000	25	40.000.000	30	45.000.000	35	50.000.000	
				Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS	100%	100%	100%	850.820.615	1	298.500.000	1	2.200.000.000	1	2.395.000.000	1	2.510.000.000	1	2.610.000.000
	250-2	Fasilitasi Kegiatan dan pembinaan PSKS	Jumlah PSKS yang terfasilitasi untuk kegiatan ke luar daerah	0	0	0	0	100 org	25.000.000	110	30.000.000	110	35.000.000	110	40.000.000	110	45.000.000	
	250-3	Pembentukan dan Fasilitasi Kegiatan Bagi FK-PSM	Jumlah FKPSM yang terbentuk dan berperan dalam penanganan permasalahan sosial	0	11	11	29.540.000	10 FK PSM	25.000.000	10	28.000.000	11	31.000.000	10	34.000.000	11	37.000.000	
	BTL 11	Bantuan Sosial bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah FKPSM yang menerima bantuan dan berperan dalam penanganan permasalahan sosial	6	30	26	260.000.000	30	150.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	

	Capacity Building bagi PSKS	Jumlah PSKS yang ditingkatkan kemampuannya dalam penanganan permasalahan sosial	120	120	120	24.000.000	50	30.000.000	60	40.000.000	90	50.000.000	90	60.000.000	90	70.000.000
251	Pelatihan Anggota KT, PSM dan Pengurus ORSOS		9	9	9	43.790.000	9 KT	25.000.000	10	35.000.000	10	40.000.000	10	45.000.000	10	50.000.000
252-1	Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT)	Terselenggaranya kegiatan BBKT	1	1	1		1 Keg	43.500.000	1	125.000.000	1 Keg	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000
252-2	Fasilitasi Kegiatan dan Bantuan Sosial Bagi K-3 S	Cakupan WKSBM yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	6	6	6	27.744.870	6	36.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	45.000.000	6	50.000.000
253	Penyelenggaraan Hari Lansia Nasional	Terselenggaranya Peringatan Hari Lansia Nasional di Tk Kab	0	0	0	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
254-1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SIKS PUSDATIN	tersedianya Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial online	0	0	0	0	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000
254-2	Fasilitasi dan bantuan sosial Kegiatan FKKT	Jumlah FKKT yang terbentuk dan berperan dalam penanganan permasalahan sosial	0	11	11	29.467.000	10	20.000.000	21	105.000.000	21	105.000.000	21	105.000.000	21	105.000.000
255-1	Fasilitasi bantuan Sosial dan Kegiatan bagi PSM	Jumlah PSM yang dibina dan dibantu	3	26	26	32.979.875	30	12.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000
255-2	Fasilitasi bantuan Sosial bagi FKPSM	Jumlah FKPSM yang dibina dan dibantu	0	11	11	29.540.000	10	18.000.000	21	105.000.000	21	105.000.000	21	105.000.000	21	105.000.000
BTL 10	Bantuan Sosial Pemberdayaan KT	Jumlah KT yang dibina dan dibantu	8	20	20	200.000.000	30	150.000.000	30	200.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000
256	Fasilitasi bantuan Sosial Pemberdayaan KT	Jumlah KT yang dibina dan dibantu	8	20	20	43.500.000	30	12.600.000	30	20.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000

	257-1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah TKSK yang mendapat bantuan tali asih	20	20	20	48.000.000	20	54.000.000	20	72.000.000	20	84.000.000	20	96.000.000	20	108.000.000
	BTL	Bantuan bagi Forum TKSK	Terbantunya sarana dan prasarana TKSK	0	0	0	-	1	10.000.000	1			10.000.000	1	-	1	10.000.000
	257-3	Fasilitasi Kegiatan Komda Lansia dan Bantuan	Kelancaran Kegiatan dan bantuan operasional Komda Lansia	3	3	3	24.809.920	3	30.000.000	3	45.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	3	60.000.000
	258-1	Pemutakhiran PMKS/PSKS	Buku Data PMKS dan PSKS 2014	1	1	1	57.448.950	1	30.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000
	258-2	Pembuatan Data Lansia	data Lansia se Kabupaten	0	0	0	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
		Bantuan Sosial Pemberdayaan WKSBM	Berkembangnya WKSBM	0	0	0	-	-	-	70	700.000.000	70	700.000.000	74	740.000.000	75	750.000.000
		Pembentukan dan Fasilitasi Bantuan Sosial Bagi WKSBM	Jumlah WKSBM yang terbentuk dan t	0	0	0	-	-	-	70	35.000.000	70	35.000.000	74	40.000.000	75	40.000.000
		Operasional Rumah Perlindungan Sosial (RPS)	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial bagi PMKS melalui RPS	0	0	0	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	program pencegahan dan kesiapsiagaan		0	100	100	48.792.500	100	54.987.600	100	50.000.000	100	55.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000
		Bantuan Operasional bagi Forum TAGANA	Terbantunya operasional Forum Tagana	0	0	0	-	1	5.000.000	1		1	5.000.000	1		1	5.000.000
		Pelatihan Penanganan Bencana	Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana terlatih	0	50	50	48.792.500	50	49.987.600	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000
	hal 238	program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	100%	100%	84.430.000	1	78.620.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000

	BTL 14	Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Soisal	Tertanganinya korban bencana alam dan bencana sosial														
	238	Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Soisal	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	100%	100%	100%	84.430.000	1	78.620.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan	meningkatkan kehidupan masyarakat yang berbudaya, aman, tertib, demokratis, dan berwawasan kebangsaan	Program Pengelolaan TMP	Prosentase TMP/MP yang terpelihara	100%	100%	100%	50.000.000	1	250.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000
	hal 236	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan	Jumlah TMP Terpelihara	2	2	2	50.000.000	2	250.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme	Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun	100%	100%	100%	2.137.226.076	1	5.081.473.492	1	2.891.901.021	1	3.194.091.123	1	3.453.700.236	1	3.782.620.259
		Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai	100%	100%	100%	1.837.050.076	1	1.992.637.292	1	2.191.901.021	1	2.411.091.123	1	2.652.200.236	1	2.917.420.259
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prosentase Pemenuhan kebutuhan surat menyurat kedinasan	100	100%	100%	1.000.000	1	1.000.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase terbayarnya biaya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	15.000.000	1	15.996.000	1	18.500.000	1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.000.000

hal	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Prosentase terpenuhinya Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional	100%	100%	100%	44.701.000	1	55.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	prosentase Pemenuhan kebutuhan Alat Kebersihan	100%	100%	100%	1.997.500	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000
hal	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase terpenuhinya Biaya ATK	100%	100%	100%	8.744.600	1	9.999.600	1	12.000.000	1	14.000.000	1	16.000.000	1	18.000.000
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Prosentase ketersediaan biaya cetak dan penggandaan	100%	100%	100%	4.423.300	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	prosentase Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000
hal	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase terpenuhinya biaya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	1.800.000	1	4.900.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase terpenuhinya Biaya penyediaan makanan dan minuman	100%	100%	100%	12.045.000	1	14.985.600	1	15.500.000	1	16.000.000	1	16.500.000	1	17.000.000
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase pemenuhan biaya untuk perjalanan Dinas Luar Daerah	100%	100%	100%	40.000.000	1	49.950.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000
hal	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Persentase pemenuhan biaya untuk perjalanan Dinas dalam Daerah	100%	100%	100%	7.000.000	1	8.965.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000
	Jasa Pelayanan Perkantoran	Prosentase terpenuhinya biaya pembayaran uang lembur dan tenaga kebersihan	100%	100%	100%	17.500.000	1	24.990.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	100%	72.232.300	1	1.439.925.000	1	207.000.000	1	216.000.000	1	225.000.000	1	224.100.000

		Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pengadaan kendaraan dalam 1 tahun	0	0	0	0	22	330.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan gedung Kantor	0%	0	0	-	1	74.925.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Pengadaan peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100%	15.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor (pembangunan gedung kantor dinas sosial dan Rumah Perlindungan Sosial)	Terpenuhinya Pemeliharaan dan pembangunan Gedung Kantor RPS dan 8 Sekretariat Lembaga/Orsos mitra Kerja Dinas Sosial	100%	100%	100%	49.482.300	1 pket	1.000.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	100%	100%	100%	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	7.000.000	1	9.000.000	1	1.100.000
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100%	4.750.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	9.000.000	1	11.000.000	1	13.000.000
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	0	0	-	1	6.600.000	-	-	1	16.000.000	-	-	1	16.000.000
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	0	0	0	1	6.600.000	-	-	1	16.000.000	-	-	1	16.000.000
Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	0%	0%	0%	-	-	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000

		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	0%	0%	0%	-	-	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
							17.357.354.292	24.429.055.184			27.023.914.542		28.915.294.747		30.209.512.971		31.680.353.018

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 – 2018

Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2014 – 2018 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 6.1
 Indikator Kinerja Dinas Sosial

INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAERAH					KONDISI AKHIR RPJMD 2018
		2014	2015	2016	2017	2018	
2	3	6	7	8	9	10	11
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	18%	18%	18%	18%	18%	18%
Persentase anak terlantar yang tertangani	%	0,93%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%
Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	%	2,88%	3,08%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	2,71%	2,71%	4,6%	4,78%	5,06%	5,06%
Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis	%	0,34%	1%	1,5%	2,25%	3%	3%
Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	%	8,34	12,34	16,34	20,34	24,34	24,34
Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	0%	24,22%	24,22%	25,61%	25,95%	25,95%
Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rasio Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	0	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 ini merupakan sebuah alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi untuk bekerja menuju 5 (lima) tahun ke depan yang memuat tentang penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Dinas Sosial yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial disusun dengan tetap memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam peraturan Perundangan-Undangan. Penyusunan Program – program dalam RENSTRA ini mengacu pada jumlah program secara hierarkis berada pada ordo yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat.

Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program-program atau rencana kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung termasuk tugas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta tugas lainnya, merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Temanggung.

Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RENSTRA serta konsistensi dokumen-dokumen perencanaan lain diperlukan monitoring dan pelaporan secara reguler dan periodik. Untuk itu diperlukan Tim Monitoring yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan Instansi Terkait, dalam rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

LAMPIRAN II

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM DINAS SOSIAL PENYUSUNAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 telah diselenggarakan forum penyusunan Renstra Dinas Sosial yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi :
 - a. VISI Kab Temanggung dan Isu Isu Strategis disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kab Temanggung
 - b. Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang agamis, Berbudaya dan sejahtera disampaikan oleh Sekretaris Dinas
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Dinas Sosial terhadap materi yang dipaparkan oleh Kepala ,Kabid dan Sektretaris , sebagaimana diskusi telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok, maka pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at Tanggal 7 Maret 2014
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Aula Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) Dinas Sosial , tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan pelayanan rancangan renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang – sidang kelompok forum Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 7 Maret 2014

Kepala Dinas Sosial
Selaku pimpinan sidang Forum Dinas Sosial

Drs. TEGUH SURYANTO

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM DINAS SOSIAL

NOMOR :

TANGGAL : 7 Maret 2014

Penyusun Renstra DINAS SOSIAL Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

NO	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Drs. Teguh Suryanto	DINAS SOSIAL	Kepala	1.
2	Umi Lestari N. S.Sos., M.Si	DINAS SOSIAL	Sekretaris	2
3	Asrori, SH. MM	DINAS SOSIAL	Kabid Potensi	3
4	Widiharso, S.Sos	DINAS SOSIAL	Kabid Rehabsos	4
5	Pontjo Marbagjo, S.ST	DINAS SOSIAL	Kasubag Perencanaan	5
6	Siti Mulyani, BA	DINAS SOSIAL	Kasubag Umpeg	6
7	Ario Purba S. M.Si	DINAS SOSIAL	Staf Perencanaan	7
8	Aries Soeprihantini, S.Sos	DINAS SOSIAL	Staf Perencanaan	8

Temanggung, 7 Maret 2014

Kepala Dinas Sosial
Selaku pimpinan sidang Forum Dinas Sosial

Drs. TEGUH SURYANTO

Daftar hadir Penyusun Renstra DINAS SOSIAL Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Tanggal : Maret 2014

NO	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Drs. Teguh Suryanto	DINAS SOSIAL	Kepala	1.
2	Umi Lestari N. S.Sos., M.Si	DINAS SOSIAL	Sekretaris	2
3	Asrori, SH. MM	DINAS SOSIAL	Kabid Potensi	3
4	Widiharso, S.Sos	DINAS SOSIAL	Kabid Rehabsos	4
5	Pontjo Marbagjo, S.ST	DINAS SOSIAL	Kasubag Perencanaan	5
6	Siti Mulyani, BA	DINAS SOSIAL	Kasubag Umpeg	6
7	Ario Purba S. M.Si	DINAS SOSIAL	Staf Perencanaan	7
8	Aries Soeprihantini, S.Sos	DINAS SOSIAL	Staf Perencanaan	8

Temanggung, Maret 2014

Kepala Dinas Sosial
Selaku pimpinan sidang Forum Dinas Sosial

Drs. TEGUH SURYANTO

Daftar Hadir Penyusun Renstra DINAS SOSIAL Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Tanggal : Januari 2014

NO	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Drs. Teguh Suryanto	DINAS SOSIAL	Kepala	1.
2	Umi Lestari N. S.Sos., M.Si	DINAS SOSIAL	Sekretaris	2
3	Asrori, SH. MM	DINAS SOSIAL	Kabid Potensi	3
4	Widiharso, S.Sos	DINAS SOSIAL	Kabid Rehabsos	4
5	Pontjo Marbagjo, S.ST	DINAS SOSIAL	Kasubag Perencanaan	5
6	Siti Mulyani, BA	DINAS SOSIAL	Kasubag Umpeg	6
7	Ario Purba S. M.Si	DINAS SOSIAL	Staf Perencanaan	7
8	Aries Soeprihantini, S.Sos	DINAS SOSIAL	Staf Perencanaan	8

Temanggung, Januari 2014

Kepala Dinas Sosial
Selaku pimpinan sidang Forum Dinas Sosial

Drs. TEGUH SURYANTO

Daftar hadir Penyusun Renstra DINAS SOSIAL Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018

Tanggal : Pebruari 2014

NO	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Drs. Teguh Suryanto	DINAS SOSIAL	Kepala	1.
2	Umi Lestari N. S.Sos., M.Si	DINAS SOSIAL	Sekretaris	2
3	Asrori, SH. MM	DINAS SOSIAL	Kabid Potensi	3
4	Widiharso, S.Sos	DINAS SOSIAL	Kabid Rehabsos	4
5	Pontjo Marbagjo, S.ST	DINAS SOSIAL	Kasubag Perencanaan	5
6	Siti Mulyani, BA	DINAS SOSIAL	Kasubag Umpeg	6
7	Ario Purba S. M.Si	DINAS SOSIAL	Staf Perencanaan	7
8	Aries Soeprihantini, S.Sos	DINAS SOSIAL	Staf Perencanaan	8

Temanggung, Pebruari 2014

Kepala Dinas Sosial
Selaku pimpinan sidang Forum Dinas Sosial

Drs. TEGUH SURYANTO

Daftar Hadir Penyusun Renstra DINAS SOSIAL Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018

Tanggal : 7 Maret 2014

NO	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Drs. Teguh Suryanto	DINAS SOSIAL	Kepala	1.
2	Umi Lestari N. S.Sos., M.Si	DINAS SOSIAL	Sekretaris	2
3	Asrori, SH. MM	DINAS SOSIAL	Kabid Potensi	3
4	Widiharso, S.Sos	DINAS SOSIAL	Kabid Rehabsos	4
5	Pontjo Marbagjo, S.ST	DINAS SOSIAL	Kasubag Perencanaan	5
6	Siti Mulyani, BA	DINAS SOSIAL	Kasubag Umpeg	6
7	Ario Purba S. M.Si	DINAS SOSIAL	Staf Perencanaan	7
8	Aries Soeprihantini, S.Sos	DINAS SOSIAL	Staf Perencanaan	8

Temanggung, 7 Maret 2014

Kepala Dinas Sosial
Selaku pimpinan sidang Forum Dinas Sosial

Drs. TEGUH SURYANTO

LAMPIRAN IV

: BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD

NOMOR :

TANGGAL : 7 Maret 2014

NO	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Drs. Teguh Suryanto	DINAS SOSIAL	Kepala	1.
2	Umi Lestari N. S.Sos., M.Si	DINAS SOSIAL	Sekretaris	2
3	Asrori, SH. MM	DINAS SOSIAL	Kabid Potensi	3
4	Widiharso, S.Sos	DINAS SOSIAL	Kabid Rehabsos	4
5	Pontjo Marbagjo, S.ST	DINAS SOSIAL	Kasubag Perencanaan	5
6	Siti Mulyani, BA	DINAS SOSIAL	Kasubag Umpeg	6
7	Ario Purba S. M.Si	DINAS SOSIAL	Staf Perencanaan	7
8	Aries Soeprihantini, S.Sos	DINAS SOSIAL	Staf Perencanaan	8

Temanggung, 7 Maret 2014

Kepala Dinas Sosial
Selaku pimpinan sidang Forum Dinas Sosial

Drs. TEGUH SURYANTO

LAMPIRAN V : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM KOMUNIKASI DINAS SOSIAL

NOMOR :

TANGGAL : 7 Maret 2014

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Dinas Sosial terhadap
Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Sosial Tahun 2013 – 2018

Kabupaten Temanggung

Tanggal : 7 Maret 2014

Tempat : Aula Dinas Sosial Kab Temanggung

ISU STRATEGIS :

1. Integrasi data penanganan kemiskinan lintas SKPD.
2. Perlindungan sosial anak dan lanjut usia yang berperspektif penyediaan tumbuh kembang anak dan penyediaan keberlanjutan kehidupan lanjut usia dalam program *daycare services*.
3. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas melalui penyediaan aksesibilitas penyandang disabilitas, eks penyandang penyakit sosial serta penyusunan payung hukum pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
4. Perlindungan dan jaminan sosial terhadap pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam serta pekerja sektor informal.
5. Penguatan kapasitas stakeholders dalam kerangka pengumpulan dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan menguatnya keberpihakan dunia usaha dalam penanganan PMKS.
6. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta perintis kemerdekaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
7. Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mendukung penanganan PMKS.

